

BAB I

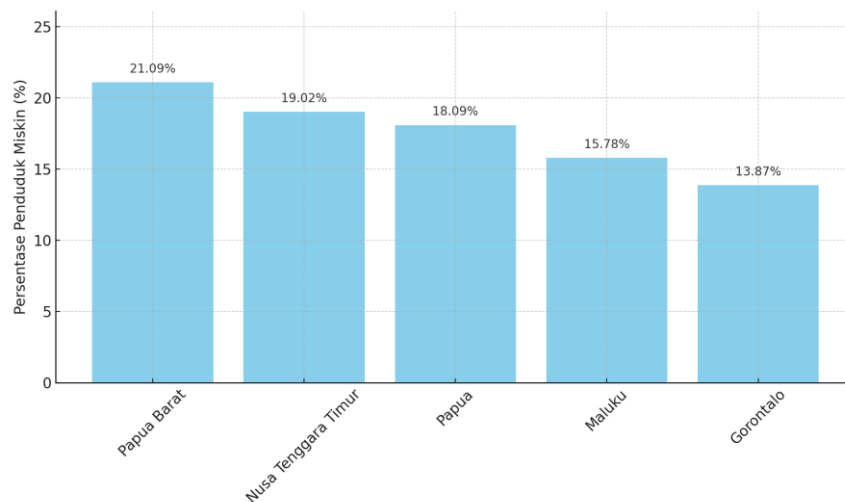
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan merupakan fokus utama agenda pembangunan nasional Indonesia. Namun, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu diikuti dengan penurunan kemiskinan secara proporsional, terutama di wilayah-wilayah dengan karakteristik daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang masih menghadapi keterbatasan akses, infrastruktur, dan layanan sosial dasar (Kemendesa PDTT, 2020). Wilayah 3T kerap mengalami tingkat kemiskinan yang jauh lebih tinggi dibandingkan daerah lain, serta hambatan sosial-ekonomi yang kompleks (Ombudsman RI, 2023)

Sektor pariwisata telah terbukti secara global menjadi salah satu penggerak utama ekonomi yang mampu mengurangi kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan masyarakat, dan penguatan ekonomi lokal (World Economic Forum, 2017). Pariwisata menimbulkan multiplier effect yang melintasi berbagai sektor, mulai dari jasa, perdagangan, hingga UMKM, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tujuan wisata. Lebih jauh, pendekatan pariwisata berbasis masyarakat (Community Based Tourism) dapat mendorong partisipasi aktif warga lokal sekaligus menjaga keberlanjutan sosial dan budaya (Lumansik et al., 2022).

Indonesia memiliki potensi pariwisata yang besar, salah satunya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Provinsi ini termasuk dalam kategori daerah 3T dan memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Gambar 1.1 menunjukkan Lima Provinsi dengan Persentase Penduduk Miskin Tertinggi di Indonesia tahun 2024.



Gambar 1. 1 Lima Provinsi dengan Persentase Penduduk Miskin Tertinggi di Indonesia Tahun 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Menurut gambar 1.1 di atas, tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara Timur menunjukkan angka sebesar 19,02% pada September 2024, dan berada pada urutan kedua provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia, setelah Papua Barat (Badan Pusat Statistik, 2024). Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya daerah 3T di Nusa Tenggara Timur yang mengindikasikan bahwa perkembangan ekonomi tidak terdistribusi secara merata dan tidak dapat mencapai semua orang, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi sektor pariwisata dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020, terdapat 13 kabupaten yang termasuk ke dalam kategori daerah tertinggal di Nusa Tenggara Timur. Daerah 3T antara lain: Sumba Barat, Sumba Timur, Kupang, Timor Tengah Selatan, Belu, Alor, Lembata, Rote Ndao, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Manggarai Timur, Sabu Raijua, Malaka (Perpres No 63, 2020)

Dari 13 kabupaten yang masuk ke dalam kategori 3T, beberapa daerah di antaranya masih banyak menyimpan daerah yang menjadi pusat unggulan pariwisata karena telah dikenal luas di tingkat nasional maupun internasional. Daerah unggulan tersebut yaitu Sumba Barat, Timor Tengah Selatan, dan Alor. Sumba Barat dikenal dengan destinasi wisata seperti Pantai Nihiwatu, Pantai Mbawana, dan Kampung Adat Ratenggaro; Timor Tengah Selatan memiliki daya

tarik seperti Pantai Kolbano, Pantai Oetune, dan Air Terjun Oehala; Alor terkenal dengan Taman Laut Selat Pantar. Pemerintah pun telah menetapkan Labuan Bajo sebagai salah satu dari 10 Bali Baru untuk mempercepat pengembangan pariwisata nasional, akan tetapi sektor pariwisata dalam PDRB Nusa Tenggara Timur masih sangat kecil yakni kurang dari 1%. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum memang tumbuh signifikan sebesar 11,95% pada tahun 2024, namun hal ini belum cukup untuk mendorong sektor pariwisata menjadi penggerak utama ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut (Badan Pusat Statistik, 2024).

Rendahnya kontribusi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi sektor pariwisata di Nusa Tenggara Timur (Taufiqurrahman & Marsisno, 2024). Banyak daerah 3T di provinsi ini seperti Sumba Barat, Timor Tengah Selatan, dan Alor, yang belum mampu mengoptimalkan pariwisata sebagai instrumen pembangunan. Dengan potensi pariwisata yang besar namun masih tingginya angka kemiskinan, muncul pertanyaan penting: apakah sektor pariwisata benar-benar mampu mendorong peningkatan ekonomi masyarakat terutama di daerah 3T seperti Nusa Tenggara Timur? Apakah pertumbuhan sektor pariwisata berbanding lurus dengan penurunan tingkat kemiskinan di wilayah tersebut.

Dalam konteks fiskal daerah, aktivitas pariwisata tercermin dari penerimaan pajak hotel dan pajak restoran. Pajak hotel dikenakan atas jasa penginapan dan erat kaitannya dengan jumlah kunjungan wisatawan, sementara pajak restoran dipungut dari konsumsi makanan dan minuman di daerah wisata. Kedua pajak ini menjadi sumber penting bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan berpotensi digunakan untuk membiayai pembangunan serta program pengentasan kemiskinan (Rijjal et al., 2024). Namun demikian, kontribusinya terhadap penurunan kemiskinan masih diperdebatkan, karena hasil penelitian di berbagai daerah menunjukkan variasi (Lubis et al., 2025). Hal ini diduga karena beberapa daerah masih didominasi usaha kecil informal dan kunjungan wisata yang belum merata, sehingga kontribusi fiskal terhadap pengentasan kemiskinan terlihat belum optimal.

Sejumlah studi telah meneliti hubungan pariwisata dengan kemiskinan. Taufiqurrahman & Marsisno (2024) menemukan bahwa jumlah wisatawan dan PDRB pariwisata berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Nusa Tenggara Timur. Hakami (2024) juga menemukan bahwa PAD sektor pariwisata berpengaruh menurunkan kemiskinan di DIY. Akan tetapi, masih sangat terbatas penelitian yang menyoroti pengaruh langsung pajak hotel dan restoran sebagai proksi aktivitas pariwisata terhadap kemiskinan, terutama di daerah 3T seperti Nusa Tenggara Timur.

Selain pajak hotel dan restoran, indikator lain yang juga penting dalam menilai kontribusi sektor pariwisata terhadap penurunan kemiskinan adalah jumlah kunjungan wisatawan dan jumlah objek wisata. Jumlah kunjungan wisatawan mencerminkan intensitas aktivitas pariwisata di suatu daerah yang dapat memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, sehingga berpotensi menurunkan tingkat kemiskinan. Temuan Taufiqurrahman & Marsisno (2024) menunjukkan bahwa jumlah wisatawan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang menegaskan bahwa peningkatan kunjungan wisatawan berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, jumlah objek wisata juga memainkan peran strategis dalam menarik wisatawan. Pratama & Harahap (2023) menemukan bahwa jumlah objek wisata berpengaruh positif signifikan terhadap PAD, yang pada akhirnya dapat digunakan untuk mendukung program pengentasan kemiskinan. Penelitian Marcella & Anas (2023) turut menguatkan bahwa jumlah wisatawan dan pengembangan destinasi pariwisata berdampak negatif terhadap tingkat kemiskinan melalui peningkatan PDRB pariwisata. Dengan demikian, semakin tinggi kunjungan wisatawan dan semakin banyak objek wisata yang dikelola secara berkelanjutan, semakin besar pula potensi sektor pariwisata dalam menurunkan tingkat kemiskinan di daerah 3T Nusa Tenggara Timur.

Namun demikian, masih terbatas kajian yang secara spesifik mengkaji pengaruh sektor pariwisata terhadap kemiskinan secara panel (antar waktu dan antar daerah) di wilayah 3T seperti Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menguji secara empiris

apakah sektor pariwisata dapat memberikan dampak nyata terhadap penurunan kemiskinan di daerah 3T, yang umumnya memiliki karakteristik geografis sulit, keterbatasan infrastruktur, serta minimnya akses terhadap pasar dan modal. Dengan menggunakan pendekatan regresi data panel, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana dinamika sektor pariwisata mempengaruhi tingkat kemiskinan selama periode waktu tertentu, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat dalam pengembangan pariwisata berbasis kerakyatan di Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi celah yang ada dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam secara empiris tentang bagaimana pariwisata mempengaruhi tingkat kemiskinan di wilayah 3T Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi serta tantangan yang ada, sekaligus memberikan rekomendasi praktis untuk memanfaatkan sektor pariwisata sebagai alat peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal yang dituangkan dalam penelitian berjudul **Pengaruh Sektor Pariwisata terhadap Tingkat Kemiskinan di daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T) Nusa Tenggara Timur.**

1.2 Rumusan Masalah

Setelah uraian identifikasi masalah, maka muncul beberapa pertanyaan berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh jumlah kunjungan wisatawan terhadap tingkat kemiskinan di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T) Nusa Tenggara Timur?
2. Bagaimanakah pengaruh jumlah objek wisata terhadap tingkat kemiskinan di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T) Nusa Tenggara Timur?
3. Bagaimanakah pengaruh pajak hotel terhadap tingkat kemiskinan di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T) Nusa Tenggara Timur?
4. Bagaimanakah pengaruh pajak restoran terhadap tingkat kemiskinan daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T) Nusa Tenggara Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh jumlah kunjungan wisatawan terhadap tingkat kemiskinan di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T) Nusa Tenggara Timur.
2. Menganalisis pengaruh jumlah objek wisata terhadap tingkat kemiskinan di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T) Nusa Tenggara Timur.
3. Menganalisis pengaruh pajak hotel terhadap tingkat kemiskinan di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T) Nusa Tenggara Timur.
4. Menganalisis pengaruh pajak restoran terhadap tingkat kemiskinan daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T) Nusa Tenggara Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Penulis

Penelitian ini merupakan kesempatan untuk memperdalam pemahaman mengenai dinamika sektor pariwisata dan tingkat kemiskinan di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), serta mengasah kemampuan dalam melakukan analisis data dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti.

2. Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dalam merumuskan strategi pengembangan pariwisata yang lebih efektif dan inklusif, dengan mempertimbangkan karakteristik unik dari masing-masing wilayah. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien, meningkatkan infrastruktur pendukung pariwisata, serta mempromosikan destinasi wisata unggulan untuk menarik lebih banyak wisatawan.

3. Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam memperluas literatur tentang hubungan antara sektor pariwisata dan tingkat kemiskinan di daerah 3T, serta mendorong penelitian lebih lanjut

mengenai topik ini. Hasil dari penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan ajar atau studi kasus dalam mata kuliah yang berkaitan dengan pariwisata, ekonomi pembangunan, dan kajian wilayah.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dipilih karena memiliki potensi pariwisata yang besar namun masih menghadapi tantangan serius dalam mengurangi angka kemiskinan. Periode penelitian yang digunakan adalah tahun 2019 hingga 2023 agar dapat menggambarkan perkembangan sektor pariwisata dalam beberapa tahun terakhir dan keterkaitannya dengan kondisi kemiskinan di wilayah tersebut. Variabel yang diteliti terdiri dari jumlah kunjungan wisatawan, jumlah objek wisata, pajak hotel dan pajak restoran sebagai representasi dari aktivitas sektor pariwisata, sedangkan variabel yang menjadi fokus utama adalah tingkat kemiskinan. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), serta dokumen pendukung lainnya yang relevan. Dengan ruang lingkup tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai kontribusi sektor pariwisata terhadap upaya pengentasan kemiskinan di daerah 3T Nusa Tenggara Timur.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri dari 5 bab yang disusun secara sistematis beserta uraian sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara umum permasalahan yang akan diteliti, yang terdiri dari enam bagian utama, yaitu latar belakang, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini mengulas landasan teori, yang mencakup pengertian kemiskinan, teori-teori utama yang digunakan sebagai rujukan, hubungan antara variabel

dependen dan independen, hipotesis, penelitian sebelumnya, serta kerangka teori yang mendasari penelitian ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai tipe penelitian, sumber serta jenis data, metode analisis, definisi operasional variabel, serta model dan teknik yang diterapkan dalam analisis data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi gambaran umum mengenai subjek penelitian serta deskripsi data yang telah dikumpulkan, analisa data, dan pembahasan atau interpretasi hasil dengan membandingkan teori dan penelitian terdahulu, serta menjawab rumusan masalah.

BAB V: PENUTUP

Bagian ini berisikan kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian serta memberikan saran-saran yang relevan untuk peneliti selanjutnya.

